

## KONTESTASI KEARIFAN LOKAL VERSUS MODERNISASI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Pardamaian Daulay<sup>1</sup>, Momy A. Hunowu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka Indonesia  
pardameandaulay@ecampus.ut.ac.id

<sup>2</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo  
momyhunowu@gmail.com

### ABSTRAK

*Kearifan tradisional dalam pengelolaan lingkungan dewasa ini tengah mengalami ancaman dengan masuknya modernisasi. Penganut kearifan lokal, kalangan tua berkontestasi dengan kalangan muda yang menganut pengetahuan modern. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana terjadinya kontestasi kalangan tua dengan kalangan muda dalam pengelolaan lingkungan. Masing-masing pihak yang berkontestasi sebagai representasi kearifan lokal dan pengetahuan modern. Kedua pihak memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Secara ekonomi, penganut kearifan lokal tidak dapat melipatgandakan nilai ekonomi tetapi lingkungan hidup terjaga dan lestari, sementara kaum muda penganut pengetahuan modern mampu melipatgandakan nilai ekonomi dengan konsekuensi kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas dan masif. Sekiranya kontestasi yang terjadi di antara dua kalangan tersebut meluas, dikhawatirkan dapat mengancam keberlanjutan proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Perlu mempertimbangkan pelibatan masyarakat lokal beserta kearifan tradisional yang dimilikinya dalam upaya pemindahan IKN.*

**Kata Kunci:** *Kontestasi Pengetahuan; Kearifan Tradisional; Modernisasi; Kerusakan Lingkungan; IKN*

### 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini mengemukakan tentang persoalan kontestasi kearifan lokal versus modernisasi, atau kontestasi masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Persoalan itu penting diangkat kembali karena studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa kontestasi kearifan lokal versus modernisasi tidak selamanya membawa hasil yang baik, bahkan tidak jarang masyarakat lokal terdegradasi dan termarginalkan. Patut diwaspadai kontestasi yang sama akan terulang dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Oleh karena itu, diakhir tulisan ini akan menawarkan solusi-solusi untuk menghindari terjadinya kontestasi dalam pengelolaan IKN, terutama dengan melirik keterlibatan pemuda.

Dalam setiap kehidupan masyarakat selalu ada dua kelompok yang saling berhadapan sebagai refleksi adanya kekuasaan. Menurut Dahrendroft, setiap kelompok memiliki kepentingan nyata yang berkontestasi secara substansial dan langsung (Tualeka, 2017). Kontestasi ini dapat terjadi dalam situasi dimana kelompok yang berkuasa mempertahankan status quo dengan cara memberi instruksi kepada golongan yang dikuasai sambil golongan ini

berupaya melakukan perubahan-perubahan. Perbedaan kepentingan menciptakan kelompok konflik potensial dan kelompok konflik aktual yang berhadap-hadapan karena memiliki kepentingan yang antagonistik (Usboko, 2016). Menurut Dahrendorf, tidak ada masyarakat yang tidak berkonflik dan tidak berkonsensus. Sebab konflik dan konsensus merupakan syarat terjadinya suatu masyarakat (Johnson, 1994). Perspektif ini penulis digunakan untuk memotret konflik dan konsensus dalam bentuk kontestasi yang terjadi di kalangan aktor dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda.

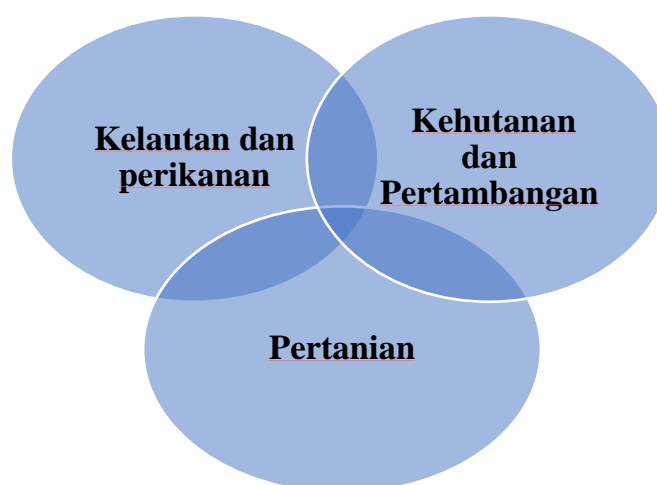
Beberapa tulisan hasil penelusuran penulis terkait dengan kontestasi kearifan lokal dengan modernisasi terjadi pada semua wilayah; *Pertama*, studi tentang anatomi konflik antara korporasi dan komunitas lokal pada industri geotermal (Prayogo, 2010). Studi ini menggambarkan relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang, minyak, dan gas yang mengalami banyak perubahan. Gejala utama yang mengemuka dalam perubahan ini adalah sering munculnya konflik vertikal, diperkirakan hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas menghadapi masalah dengan komunitas lokal.

Studi Zainuddin dkk (2010) menemukan bahwa masyarakat lokal selalu dianggap tidak ada pada bentang wilayah kekayaan sumberdaya alam, seakan-akan bentang wilayah tersebut tak berpenghuni dan tidak dikuasai oleh siapapun. Karena itu apabila masyarakat lokal muncul di lokasi itu, mereka selalu diperlakukan tanpa memperdulikan konteks budaya atau ekologi sebagai kelompok perusak yang harus disingkirkan demi melindungi kekayaan dan sumber-sumber alam yang akan dikelola. Pandangan ini menyangkal hak-hak kepemilikan berbasis masyarakat tetapi juga menutup peluang penggalan manfaat dan nilai alternatif kekayaan dan sumber-sumber alam. Penetrasi perusahaan ke wilayah hutan lindung terus berlanjut. Sebagaimana diberitakan koran Tempo; (2013). Tambang emas di daerah Banyuwangi diduga masuk area terlarang (TEMPO.CO). Fenomena perebutan hutan memaparkan tajuk sosial yang berlapis-lapis dan rumit, di mana akses dan kontrol atas hutan diperebutkan oleh beragam aktor dengan beragam kepentingan, cara, dan tujuan yang saling berkaitan, berbenturan dan berkelindan (Simaepa 2012). Pengelolaan hutan negara yang sentralistik selama ratusan tahun terbukti telah menyisakan berbagai persoalan; kemiskinan, konflik dan degradasi sumberdaya hutan yang luar biasa. Akar dari permasalahan ini adalah gagalnya sistem tata kuasa dan tata kelola hutan yang dibangun oleh negara. Jika ini terus berlanjut, akan mengganggu agenda-agenda besar yang sudah dicanangkan.

*Kedua*, kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Royandi and Keiya 2019). Studi ini menyimpulkan bahwa masyarakat nelayan kecil dilihat sebagai masyarakat yang berada pada lapisan bawah karena minim kekuatan. Oleh karena itu, nelayan kecil tidak dapat berbuat apa-apa ketika wilayah laut mereka dirubah untuk kepentingan orang-orang besar dan didukung oleh kekuasaan negara. Akibatnya tentu jelas, nelayan kecil kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan akses ke laut, dan kerugian-kerugian lainnya yang bersangkutan dengan akses sumber daya.

*Ketiga*, kontestasi pengetahuan di bidang pertanian. Studi yang dilakukan Nurdiah Husnah (2015) tentang kontestasi pengetahuan berbasis pengalaman dan berbasis ilmiah menemukan bahwa pengetahuan budidaya tanaman berbasis pengalaman berakar pada budaya dan pengamatan empiris dengan panca Indera dan terbentuk berdasarkan respon terhadap fenomena alam. Sementara pengetahuan berbasis ilmiah pada budidaya tanaman terbentuk berdasarkan respon terhadap preferensi pengguna. Sementara itu studi yang dilakukan Taufik Hidayat, dkk. (2010) tentang kontestasi sains dengan pengetahuan lokal petani dalam pengelolaan lahan rawa pasang surut menemukan bahwa perkembangan pertanian modern di lahan rawa pasang surut tidak terlepas dari proses hegemoni melalui institusi pemerintah. Proses kontestasi di lahan rawa pasang surut menghasilkan bentuk koeksistensi, dominasi, serta hibridisasi antara sains dengan pengetahuan lokal petani. Hibridisasi antara sains dan pengetahuan lokal menunjukkan bahwa kedua entitas pengetahuan ini dapat saling mengisi kekurangan dan keterbatasan yang

dimiliki (Hidayat, dkk., 2010). Hibridisasi pengetahuan tradisional dan modern terjadi pada pertanian jagung (Hunowu, dkk., 2021; Hunowu, Lampe, dan Idrus 2022).



**Gambar 1.** Kontestasi Kearifan Lokal VS Modernisasi  
Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Berdasarkan studi terdahulu tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kontestasi pengetahuan dalam pengelolaan sumberdaya alam masih terus berlanjut di semua sektor. Namun, beberapa tulisan terdahulu tersebut belum secara spesifik mengulas tentang kontestasi pengetahuan antara aktor tua dan muda dalam pengelolaan sumber daya alam. Kontestasi antara aktor tua dan muda dalam pelestarian sumberdaya alam belakangan ini juga kerap terjadi. Hal yang sama sangat dimungkinkan akan terjadinya kontestasi antara aktor tua dan muda dalam rangka pemindahan IKN terkait dengan pelestarian sumberdaya alam yang dimiliki komunitas lokal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kontestasi pengetahuan tradisional dengan pengetahuan modern yang melibatkan aktor tua dan muda dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dikuasai negara. Aspek apa saja yang menjadi titik genting antara kaum muda dan kaum tua sebagai representasi pengetahuan modern dan kearifan lokal.

## 2. METODE

Tulisan ini dirancang berdasarkan data-data sekunder, terutama bersumber dari hasil studi terdahulu. Pengambilan data sekunder berasal dari studi-studi terdahulu terutama pada lokus taman nasional yang dikelola negara dan menunjukkan adanya kontestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut (Hunowu 2004). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Data sekunder diklasifikasi secara tematis untuk menggambarkan adanya kontestasi pengetahuan lokal dengan modernisasi. Klasifikasi data dilakukan selain atas dasar tema juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang tercakup. Data dianalisis melalui tiga tahapan: restatement data, deskripsi data, dan interpretasi data. Restatement dilakukan dengan mengacu pada kutipan-kutipan data sekunder. Deskripsi data dilakukan untuk menunjukkan pola atau kecenderungan data menyangkut tipologi kontestasi kearifan lokal dan pengetahuan modern. Proses interpretasi dilakukan dengan memperhatikan konteks yang melatarbelakangi kedua pihak yang menjadi alasan terjadinya kontestasi. Ketiga tahapan analisis tersebut menjadi dasar

penarikan kesimpulan (inferensi). Data yang bersumber dari studi yang berbeda menjadi pembandingan yang saling menguatkan data yang ada.

### **3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI**

Terdapat 3 aspek yang menjadi titik genting antara kaum muda dan kaum tua sebagai representasi pengetahuan modern dan kearifan lokal. Ketiga aspek ini akan diulas sebagai berikut:

#### **3.1. Ketegangan Kaum Muda dan Tua Bermula**

Masyarakat yang mendiami pinggiran hutan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kearifan lokal itu sudah berjalan dengan baik sebelum negara mengklaim wilayah hutan mereka sebagai taman nasional. Hukum adat yang dianut masyarakatnya masih sangat kuat. Terdapat sanksi yang diberikan oleh lembaga adat kepada mereka yang memperlakukan alam semena-mena. Para pemuda mulai merantau ke kota untuk mengenyam pendidikan. Beberapa tahun kemudian mereka pulang dengan menyandang gelar sarjana. Jumlah mereka mulai bertambah, dan membentuk satu entitas baru, sebagai kaum terdidik. Persentuhan mereka dengan modernisasi di kota telah merubah cara pandang terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Dalam beberapa hal, kaum muda mulai berbeda dengan kaum tua. Apalagi ketika beberapa pemuda bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, dipertegas dengan kehadiran negara yang mendukung cara pandang kaum muda. Dari sinilah muncul ketegangan antara kaum muda dengan kaum tua yang merepresentasi pengetahuan modern dan kearifan lokal.

#### **3.2. Cara pandang dalam Revitalisasi Hukum Adat**

Inti dari kontestasi kaum muda dan tua sebagai representasi pengetahuan modern dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pada cara pandang keduanya terhadap revitalisasi kearifan lokal. Kaum tua memandang bahwa untuk menjaga kelestarian alam, tiada jalan lain selain kembali menerapkan aturan adat yang pada masa lalu telah berhasil menjaga harmoni dengan alam secara berkelanjutan. Sementara kaum muda berpandangan bahwa hukum adat pada masa lalu sudah tidak bisa diterapkan secara persis dengan kondisi masyarakat yang sudah berubah. Atas dasar ini, kaum muda berpandangan bahwa terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

#### **3.3. Kaum Muda dianggap Merebut Posisi Kaum Tua**

Selain aspek material hukum adat, aspek lain yang menciptakan kontestasi kaum tua dan muda adalah nuansa politik kekuasaan. Kaum muda dianggap oleh kaum tua belum pantas melakukan revitalisasi hukum adat. Urusan hukum adat adalah wewenang kaum tua. Jika dicermati, aspek ini lebih bernuansa politis. Posisi kaum tua merasa direbut/digeser oleh kaum muda dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kekuatan kaum muda yang mendapat dukungan negara tentu saja memenangkan kontestasi ini. Meskipun demikian, kaum muda tetap respek kepada kaum tua sebagai sesepuh adat yang telah menjaga kelestarian alam sekian lamanya. Kondisi ini melahirkan kompromi yang berakhir pada hibridasi pengetahuan.

### 3.4. Mengedepankan Potensi Kaum Muda dalam Pembangunan IKN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2019 presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan IKN ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi kita semua khususnya bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Namun, seiring dengan berpindahnya Ibu Kota Ke Kalimantan Timur, ke depan akan banyak tantangan yang dihadapi, sebut saja dalam waktu dekat akan hadir 2 – 3 juta orang atau bahkan lebih yang akan bermigrasi ke Kalimantan Timur. Mulai dari orang yang memiliki *skill* hingga yang non skill pun akan pindah ke Ibu Kota Negara, ibarat layaknya mata air di mana ada mata air pasti semua orang akan menuju dan mendatangi, itulah Ibu Kota Negara. Hal ini, tentu menjadi tantangan bagi masyarakat asli Kaltim maupun Kutai Kartanegara apakah kemudian sudah siap menyambut IKN dan bersaing dengan jutaan orang yang akan bermigrasi ke Kutai Kartanegara?

Belajar dari hasil studi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumberdaya alam. Untuk menghindari terjadinya kontestasi, terutama dalam pembangunan IKN baru, seharusnya dapat disambut dengan mengedepankan peran pemuda sebagai garda terdepan. Sebagai pionir, kaum muda memiliki banyak potensi untuk mendukung dan mensukseskan hadirnya ibu kota yang beriringan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Data BPS 2021 menunjukkan bahwa sekitar 68,89% dari penduduk Kaltim atau 2,62 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif. Kondisi ini, menjadi potensi besar yang perlu dioptimalkan dalam membangun IKN baru ke depan.

Namun, potensi jumlah SDM produktif akan menjadi masalah baru apabila tidak dikelola dengan baik. Jika pemuda tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang, dikhawatirkan ketika IKN sudah siap kemudian mereka tidak bisa bersaing dengan pendatang yang mungkin skillnya lebih di atas. Ironisnya pemuda Kutai Kartanegara *Shock Culture* ketika Ibu Kota Negara Baru nanti sudah berjalan. Hal ini akan mengulang pertarungan dan konflik antar pendatang baru vs masyarakat lokal seperti yang dijelaskan dalam studi-studi terdahulu.

Oleh karena itu, mulai dari sekarang pemerintah harus mengedepankan potensi pemuda dalam Pembangunan IKN. Kapasitas dan kapabilitas pemuda harus terus ditingkatkan, tidak hanya kemampuan akademis di sekolah maupun di kampus namun juga kemampuan non akademis semisal kemampuan Bahasa Inggris, Komputer dan lain sebagainya yang tidak kita dapatkan secara maksimal di bangku pendidikan. Bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada khususnya pemerintah daerah Kutai Kartanegara untuk sama – sama merumuskan skema dan *grand desain* dalam penyiapan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam menyiapkan pemuda dan masyarakat Kutai Kartanegara dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

## 4. KESIMPULAN

Meluruhnya kearifan lokal di medan kontestasi selain karena dianggap tidak mendukung peningkatan ekonomi masyarakat juga disebabkan oleh dominasi modernisasi yang digalakkan pemerintah dengan target peningkatan ekonomi nasional. Pada beberapa aspek, kearifan lokal kembali diperhatikan ketika modernisasi justru melahirkan masalah baru, terutama kerusakan lingkungan. Kondisi ini harus dipertahankan agar tidak berdampak pada pemindahan IKN. Untuk menghindari terjadinya kontestasi dalam pengelolaan IKN, perlu melibatkan dan melirik keterlibatan pemuda.

## REFERENSI

- Hidayat, Taufik, dkk. 2010. *Kontestasi Sains Dengan Pengetahuan Lokal Petani Dalam Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut*. (Sodality 4(1):181202).
- Hunowu, Momy A. 2004. *Forest Resource Management : Battlefield of Local Knowledges Among Local Leaders*. Bogor; IPB University.
- Hunowu, Momy A., Munsil Lampe, dan Nurul Ilmi Idrus. 2022. *From Sacred to Profane : Efforts to Control The Corn Pests in Gorontalo , Indonesia*. (Journal of Sustainability Science and Management 17(5):117–32. doi: 10.46754/jssm.2022.05.009).
- Hunowu, Momy A., Yowan Tamu, Muhammad Obie, and Hatim Badu Pakuna. 2021. *Modernization and Shifting Practices of Local Wisdom on Corn Farming in Gorontalo Province Modernisasi Dan Pergeseran Praktik Kearifan Lokal Pada Pertanian Jagung Di Provinsi Gorontalo*. (Jurnal Sodality 09(02):1–15. doi: 10.22500/9202134694).
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta; Gramedia Pustaka.
- Prayogo, Dody. 2010. *Anatomi Konflik Antara Korporasi Dan Komunitas Lokal Pada Industri Geotermal Di Jawa Barat*. (Makara, Sosial Humaniora 14(1):25–34).
- Royandi, Eva, and Ricardus Keiya. 2019. *Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta*. (TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial 2(1):77–98. doi: 10.15575/jt.v2i1.3619).
- Simaepa, Darmanto. 2012. *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, Dan Politik Ekologi*. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia; Unesco.
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*. (Al-Hikmah 3(1):32–48. doi: 10.30651/ah.v3i1.409).
- Usboko, Ignasius. 2016. *Role Players Analysis Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jurnal Politika 7(1):1–21).
- Zainuddin, Sulthan, dkk. 2010. *Kontestasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan SDA*. (Jurnal Academica Fisip Untad 2(02):455–68. doi: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2308/1496>).